



Analisis Pengelolaan Infak melalui Keterbukaan Informasi pada Mushola Al Barokah, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Rangga Ilham Pangestu Aji^{1*}, Aji Damanuri²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

ranggailham359@gmail.com

*corresponding author

Abstract: *The development of information changes has an impact on infaq management in Indonesia. Primarily, the management of infaq is implemented traditionally. However, it has begun to use technological assistance in infaq management, as has been done by the Al Barokah Mosque. Al Barokah Mosque manages infaq openly by utilizing technology and information media. Obstacles faced by infaq managers in fostering interest and motivation in the local community, among others, are the low interest of the community to spend, which is affected by low-income levels, the unattractiveness of the existing infaq program, and the limited understanding of the community about zakat (limited to zakat fitrah). This study analyzes infaq management through information disclosure at the Al Barokah Mosque, Sirnobojo Village, Pacitan District, Pacitan Regency. The research method used is the qualitative method. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results show that financial management at the Al Barokah Mosque has been going well. It is proven by the community that actively engaged in the mosque's activities. However, regarding the use of social media and websites for financial and program reporting, it is still not optimal (rarely updated) due to a shortage of human resources who can do so.*

Keywords: *infaq; information disclosure; management*

Abstrak: Pengelolaan infak di Indonesia seiring perkembangan teknologi informasi ikut mengalami perubahan dalam pengelolaannya. Semula pengelolaan infak dilakukan secara tradisional, tetapi kini mulai merambah menggunakan bantuan teknologi di dalam pengelolaannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mushola Al Barokah. Mushola Al Barokah mengelola infak secara terbuka dengan memanfaatkan media teknologi dan informasi. Kendala yang dihadapi oleh pengelola infak dalam menumbuhkan minat dan motivasi masyarakat setempat, di antaranya adalah rendahnya minat masyarakat untuk berinfaq dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang masih rendah, kurang menariknya program infak yang ada, dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang zakat (sebatas zakat fitrah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan infak melalui keterbukaan informasi di Mushola Al Barokah, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Mushola Al Barokah sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran aktif jamaah secara langsung dalam kegiatan mushola. Namun, terkait penggunaan media sosial dan *website* untuk pelaporan keuangan maupun pengelolaan program-program mushola masih belum optimal (jarang diperbarui) karena kekurangan SDM yang memiliki kemampuan untuk itu.

Kata Kunci: infak; keterbukaan informasi; pengelolaan

PENDAHULUAN

Masjid dan mushola dipandang perlu mengelola infak secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan karena masjid dan mushola adalah simbol umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan keumatan. (Nucare.id, 2022). Salah satu contohnya adalah di Mushola Al Barokah, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang memiliki keunikan dibandingkan masjid maupun mushola di sekitarnya karena dalam pengelolaan infaknya dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan media teknologi dan informasi yang cukup beragam, mudah, serta terjangkau.

Mushola Al Barokah memanfaatkan media sosial untuk melaporkan setiap kegiatan pengelolaan infak, di antaranya adalah kotak infak tematik. Pada kotak infak tersebut tertera program infak yang dilaksanakan, yaitu pengecatan dinding mushola dan pembayaran listrik. Informasi tersebut memberikan gambaran kepada para jamaah agar percaya dan yakin bahwa infak mereka akan disalurkan. Lalu, juga ada program subsidi sembako subuh bagi jamaah yang merupakan bagian dari 8 asnaf. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar mushola untuk berdonasi di Mushola Al Barokah dan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat umum untuk menumbuhkan minat Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di mushola. Tidak hanya melalui *website*, dalam menyampaikan pengelolaan infak dan informasi terbaru dari setiap program kerja yang ada di Mushola Al Barokah juga dilakukan melalui media sosial *Facebook*.

Penyampaian informasi terkait pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (selanjutnya, disebut ZIS) sebagai pertanggungjawaban saat ini sangat dimudahkan seiring majunya perkembangan teknologi informasi seperti *website*, media sosial, *email*, dan berbagai aplikasi berbagi pesan yang mendorong keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi merupakan hal yang penting, mengingat dengan adanya transparansi berarti

terdapat keterbukaan yang mana dalam setiap proses *fundraising* perolehan infak wajib tercatat. Apabila lembaga amil zakat tidak melaksanakan prinsip transparansi, maka masyarakat akan ragu terhadap kredibilitas dari lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Dalam pengelolaan infak, pengumpulan dan pendistribusian secara transparan merupakan dua hal yang sama pentingnya (Khasanah, 2010). Oleh karena itu, pengelola infak harus menyusun pengelolaan infak secara transparan kepada orang-orang yang telah membayar infak karena dana yang telah dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai hak masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Masyarakat pada saat ini dapat mengeluarkan infak dengan mudah serta mengetahui pendistribusian infak dengan mudah pula tatkala dibantu dengan kemajuan teknologi informasi (Hafidhuddin, 2008). Dengan adanya prinsip transparansi pada pengelolaan infak tersebut, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola infak. Jika kepercayaan masyarakat terjaga, maka masyarakat akan selalu mendonasikan hartanya melalui pengelola infak.

Kendala yang dihadapi pengelola infak dalam menumbuhkan minat dan motivasi cukup beragam dan banyak di antaranya minat masyarakat untuk infak masih rendah karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang masih rendah, program infak yang kurang menarik, dan pemahaman masyarakat tentang zakat hanya sebatas zakat fitrah (Alam, 2018). Kendala tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan menggalakkan ajakan untuk melakukan infak dengan berbagai program yang menarik melalui kemajuan teknologi informasi, terkhusus *website* dan media sosial.

Infrastruktur umat yang pertama kali harus dimanfaatkan ialah masjid dan mushola karena hanya masjid yang ada di setiap penjuru tanah air. Tak kurang dari 700.000 buah masjid terdapat di pelosok daerah Indonesia. Selama ini, kebanyakan fungsi dari *ta'mir* masjid ialah penentuan petugas azan, *iqamah*, khotbah jumat, imam serta fungsi sosial yang tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Pengalangan dana yang dilakukan sebagian besar masjid masih melalui kotak amal, baik yang berjalan di antara shaf shalat, dipajang di pintu masjid, atau di atas drum persis di tengah jalan umum (Mufraini, 2008).

Penerapan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan teknologi pada pengelolaan ZIS di mushola diharapkan dapat mengoptimalkan *fundraising* yang memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar mushola. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan infak melalui keterbukaan informasi pada Mushola Al Barokah.

TINJAUAN LITERATUR

A. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan kesatuan dan perangkat yang mempunyai hubungan satu sama lain (Faisal, 2008). Sedangkan, menurut Sutanta, sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melakukan suatu fungsi guna mencapai tujuan (Sutanta, 2003). Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran dan maksud. Bagian-bagian tersebut dinamakan subsistem yang merupakan kompleksitas tersendiri, akan tetapi beroperasi secara harmonis dengan subsistem yang lain pula. Jadi, pada dasarnya setiap sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Sedangkan, subsistem dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil pula yang namanya subsistem-subsistem (Davis, 2002). Di dalam pengambilan keputusan seorang manajer tidak akan lepas dari sistem, sebab sebuah sistem akan membantu kita menghilangkan keraguan dan menetapkan ke arah mana kita melangkah. Jadi, dengan adanya sebuah sistem, seorang manajer akan mempunyai pedoman yang pasti dalam pengambilan keputusan (Leod, 2010).

2. Manajemen memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi dasar manajemen, adalah sebagai berikut

1. *Planning* (perencanaan)

Merupakan suatu kegiatan merancang agenda yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Dalam lembaga zakat, hal ini sangat penting karena rencana strategi merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan. Alasannya menyangkut kepercayaan, masyarakat, dan pengelolaan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Merupakan salah satu cara yang diakukan oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya agar bisa berjalan secara maksimal sesuai tupoksi kerjanya. Dalam lembaga zakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing dalam lembaga tersebut. Adapun alasan orang ikut terjun dalam pengelolaan ZIS, saat berbicara organisasi, semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi ataupun golongannya harus dihilangkan.

3. *Actuating* (pengarahan)

Merupakan proses mengarahkan agar dalam pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal. Dalam proses pengarahan, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, di antaranya komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi.

4. *Controlling* (pengawasan)

Merupakan salah satu proses pengawasan aktivitas yang baik dimana mencegah perbuatan yang menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga (Ridwan, 2016).

3. Tujuan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Adapun tujuan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah perusahaan adalah dengan tujuan (Budiono, 2013):

- a. Meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat membantu operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Dengan menanamkan investasi pada tingkat teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan cara meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar.
- b. Untuk memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya.
- c. Untuk membangun sumber-sumber informasi yang strategis Teknologi sistem informasi memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun sumber

informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membuat basis informasi strategis yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing perusahaan. Informasi ini merupakan aset yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif dari perusahaan.

Sistem informasi manajemen secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja proyek dan kinerja perusahaan dengan skala luas dalam hal fungsi ekonomi, fungsi jaminan kualitas, fungsi waktu serta fungsi evaluasi proyek dengan tampilan data dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen saat ini semakin dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya untuk meningkatkan kelancaran aliran informasi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing perusahaan mauapun produk/jasa yang dihasilkan serta dapat menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk menerapkan sistem informasi manajemen yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia bisnis yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang semakin canggih.

4. Faktor-Faktor dan Indikator Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Suatu aplikasi sistem informasi bisa dievaluasi berdasarkan tiga faktor, yaitu teknis, operasional, dan ekonomis. Untuk pengaplikasian dari penerapan ini, disebut sebagai pengukuran kelayakan atas faktor hasil penerapan. Dimana untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen ini, tiga faktor di atas harus dilakukan perhitungan secara menyeluruh yang meliputi permasalahan teknis, operasional, dan ekonomis (Davis, 1996).

a. Faktor teknis meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Terdapat metode perhitungan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemecahan masalah;

- 2) Sistem pengoperasian mendukung pendekatan operasional yang diusulkan;
- 3) Tingkat transmisi data cukup cepat untuk melakukan pemrosesan/penanganan;
- 4) Terdapat sarana penyimpanan tambahan yang cukup untuk merekam *file* yang diperlukan;
- 5) Unit pusat pengolah data mempunyai kemampuan untuk menanggapi semua permintaan dalam jangkauan waktu yang telah ditentukan.

Bilamana semua faktor bidang teknis tersebut menunjukkan aplikasi tidak efektif, maka hal ini menunjukkan secara jelas bahwa kemampuan teknis perangkat lunak yang disediakan sebagai pemakaian tidak memiliki kemampuan untuk mendukung aplikasi secara mantap. Suatu pengoperasian pada waktu *online* biasanya akan berhasil, tetapi harus dikerjakan secara perlahan karena alat-alat yang dipakai untuk pengolahan data tidak cukup untuk menangani beban kerja.

b. Faktor operasional

Kelayakan operasional senantiasa berkaitan dengan masalah apakah data masukan dapat disediakan dan kelancaran *at* yang dihasilkan akan benar-benar dipergunakan. Pelaksanaan faktor operasional harus dimulai dengan mentelurusi seberapa baik aplikasi itu bekerja dalam hubungannya dengan masukan, selanjutnya tinjauan atas tingkat kesalahan dan diteruskan dengan ketepatan waktu.

c. Faktor ekonomis

Biaya yang diperlukan dengan perbedaan kecil merupakan pengeluaran untuk menjalankan suatu aplikasi. Bila ditinjau dari segi pengeluaran dan manfaat, sistem informasi manajemen akan efektif bila pertambahan hasil yang diperoleh karena adanya informasi yang lebih besar dari pada biaya operasional sistem informasi manajemen tersebut. Indikator atau alat ukur penerapan sistem informasi manajemen, yaitu (Budiono, 2013):

- 1) Sistematis. Merupakan keteraturan penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan yang memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan.
- 2) Kemudahan pengumpulan data. Penerapan sistem informasi manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengumpulan data.
- 3) Kemudahan mengakses *database*. Penerapan sistem informasi manajemen yang baik dalam perusahaan akan memberikan kemudahan dalam melakukan pengaksesan *database*.
- 4) Memudahkan pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi manajemen yang baik dalam perusahaan akan menjadikan perusahaan lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan.

B. Konsep Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Andriant, 2007). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran, yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan

menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

2. Keterbukaan informasi publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mengetahui rencana pembuatan, pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan untuk meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Payung hukum transparansi informasi di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berasas:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi

diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).

Pelayanan yang baik ditunjang harmonisasi antara warga masyarakat dengan OPZ menjadikan peran masyarakat dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan terakomodasi di dalamnya. Terakomodasinya masyarakat dalam OPZ berdampak pada keberlanjutan keinginan untuk berzis (Nurdiansyah, 2018).

Jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik tersebut kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, yaitu yang efektif dan efisien, akuntabel, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan tersebut juga bertujuan agar pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas guna mendapatkan kepercayaan masyarakat (Wibawa, 2019).

3. Indikator Transparansi

Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan-laporan, melainkan juga bahwa laporan-laporan tersebut harus diberikan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator (Arijanto, 2011):

- a. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur;
- b. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi;
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
- d. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin;

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya, ada enam indikator transparansi yaitu sebagai berikut (Raudhah, 2016):

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses;
- b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan;
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum;
- d. Laporan tahunan;
- e. *Website* atau media publikasi organisasi;
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- b. Adanya publikasi mengenai laporan pengelolaan dana;
- c. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana;
- d. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan infak;
- e. Kejelasan dan kelengkapan informasi;
- f. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan alokasi dana.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut (Putra dkk., 2017):

- a. Kebijakan;
- b. Regulasi;
- c. Program;
- d. Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

C. Filantropi Islam

1. Pengertian Filantropi

Istilah filantropi, berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*Philanthropy*." Kata *philantropy* terdiri dari dua kata, yaitu "*philos*" dan "*anthropos*". Kata *philos* yang berarti cinta atau kasih dan *anthropos* yang berarti manusia. Bila diartikan,

kira-kira berarti cinta atau belas kasih kepada sesama manusia (Burhani, 1999). Maka, filantropi dapat diartikan sebagai upaya menolong sesama, kegiatan dermawan, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga, maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain.

Kata filantropi sendiri merupakan istilah yang sangat asing pada periode Islam awal, meskipun demikian akhir-akhir ini sejumlah istilah Arab mulai digunakan sebagai padanannya. Kadang-kadang filantropi disebut dengan *al-‘ata’ al-ijtima‘i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan dengan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *‘ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Meskipun, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga kerap kali digunakan.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti infak, sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun, istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, *civil society*, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan, tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.

Konsekuensi dari makna di atas, definisi yang diberikan tentang filantropi sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu, atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan

tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya. Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, dimana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung.

Menurut Abdiansyah Linge mengutip dari Dawam Rahardjo, praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang. Sementara itu, Warren Weaver, direktur *Rockefeller Foundation* (Amerika Serikat), menegaskan bahwa filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada masa kuno. Plato, misalnya, konon telah memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan penganut Zoroasterianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan (Linge, 2015).

2. Pengertian Lembaga Filantropi

Konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving, service, dan association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian. Filantropi berkembang dalam dua varian besar, yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial (Abidin, 2012). Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang diperhatikan masalah duniawi, terutama masalah kemiskinan.

Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan akhirat saja, tetapi juga menyangkut tentang kehidupan duniawi, terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Konsep filantropi tidak dapat dipungkiri berdampak pada praktik-praktik filantropi yang ada di masyarakat. Begitupun dengan pemahaman filantropi dalam perspektif agama yang kemudian menambah dimensi baru implementasi filantropi keagamaan. Keterlibatan secara luas seluruh aktivitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi.

3. Peran Lembaga Filantropi

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur ini, maka dapat disebut sebagai lembaga filantropi. Dalam upaya mencapai tujuan, pengelolaan lembaga filantropi ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, lembaga filantropi juga berperan sebagai instrumen keadilan ekonomi.

Filantropi merupakan suatu konsep yang terdapat dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan, melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Efektivitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan (Linge, 2015).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Filantropi

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. Pertama, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial. Motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan, dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal merupakan alternatif sumber dana pembangunan (Tamin, 2011).

4. Filantropi dalam Islam

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti zakat, infak, shadaqad, dan wakaf. Kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasarkan dalam perintah yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Lembaga ini semakin berkembang karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat. Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Linge, 2015).

5. Bentuk Filantropi dalam Islam

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu zakat, shadaqah, infak, dan wakaf.

a. Zakat/ Shadaqah

Secara terminologi,, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting yang kerap kali diterangkan dalam Al-Qur'an. Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan solat. Zakat ibadah yang dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya

b. Infak

Infak yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana

orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

c. Wakaf

Wakaf adalah instrumen filantropi yang mendasarkan fungsinya pada unsure kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT. yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Jadi, dari beberapa bentuk bantuan filantropi di atas, terdapat sedikit perbedaan. Jika wakaf adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang, infak adalah bantuan yang diberikan tanpa jumlah nominal tertentu, sedangkan zakat adalah bantuan yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan waktu dan jumlah nominal yang harus dikeluarkan.

6. Pengelolaan Infak

Pengelolaan infak adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Infaq (Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1). Pengelolaan infak berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengelolaan infak bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan infak sesuai dengan tuntutan syari'at agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna daya infak.

Fundraising secara bahasa adalah kegiatan menggalang atau menghimpun dana (Susilawati, 2018), sedangkan menurut istilah, *fundraising* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam rangka menghimpun dana baik berupa zakat, infaq, sedekah (ZIS) dalam bentuk jasa, uang, atau barang yang dimana hasilnya dimanfaatkan dalam rangka membatu kelangsungan hidup masyarakat banyak (Abidah, 2011).

Fundraising dimasa ini mengalami perubahan metode pelaksanaannya. Ketika dahulu lembaga menerima pembayaran secara langsung atau konvensional, sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi *e-money* (Susilawati, 2018). Metode di atas dapat dilakukan dengan lebih mudah mengakses, dimanapun kapan pun semua orang dapat menyalurkan dana mereka, sedangkan cara konvensional lama-kelamaan mulai ditinggalkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena akan memaparkan secara menyeluruh (holistik) permasalahan berkenaan dengan proses pengelolaan infak menggunakan bantuan teknologi informasi yang berdampak pada motivasi orang untuk berinfaq serta kendala yang dihadapi pengelola Mushola Al Barokah. Gejala interaksi sosial dan menemukan pola yang akan di pahami melalui pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen, konsep transparansi, dan filantropi dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Manajemen Pengumpulan Infak pada Mushola Al Bakorah, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Sistem informasi manajemen secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja proyek dan kinerja perusahaan dengan skala luas dalam hal fungsi ekonomi, fungsi jaminan kualitas, fungsi waktu serta fungsi evaluasi proyek dengan tampilan data dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen saat ini semakin dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya untuk meningkatkan kelancaran aliran informasi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing perusahaan maupun produk/jasa yang dihasilkan serta dapat menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk pengaplikasian dari penerapan ini disebut sebagai pengukuran kelayakan atas faktor hasil penerapan. Dimana untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen ini, tiga faktor di atas harus dilakukan perhitungan secara

menyeluruh yang meliputi permasalahan teknis, operasional, dan ekonomis (Davis, 1996).

1) Faktor teknis

Faktor teknis meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a) Terdapat metode perhitungan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemecahan masalah;
- b) Sistem pengoperasian mendukung pendekatan operasional yang disusulkan;
- c) Tingkat transmisi data cukup cepat untuk melakukan pemrosesan/penanganan;
- d) Terdapat sarana penyimpanan tambahan yang cukup untuk merekam *file* yang diperlukan;
- e) Unit pusat pengolah data mempunyai kemampuan untuk menanggapi semua permintaan dalam jangkauan waktu yang telah ditentukan.

Dalam faktor teknis, Mushola Al Barokah menerapkan bahwa penerimaan dana untuk mushola Sebagian besar dari masyarakat dan jama'ah Mushola Al Barokah itu sendiri. Walaupun, ada juga bantuan atau sumbangan dari pihak pemerintah, tetapi tidak rutin. Hal tersebut sudah sesuai dengan faktor teknis dalam sistem informasi manajemen.

2) Faktor operasional

Kelayakan operasional senantiasa berkaitan dengan masalah apakah data masukan dapat disediakan dan kelancaran *output* yang dihasilkan akan benar-benar dipergunakan. Pelaksanaan faktor operasional harus dimulai dengan menelusuri seberapa baik aplikasi itu bekerja dalam hubungannya dengan masukan, selanjutnya tinjauan atas tingkat kesalahan dan diteruskan dengan ketepatan waktu. Dalam penerapannya pengoperasian media sosial, baik *website* atau *blog*, Mushola Al Barokah kurang konsisten dalam pembaruan informasinya.

3) Faktor ekonomis

Biaya yang diperlukan dengan perbedaan kecil merupakan pengeluaran untuk menjalankan suatu aplikasi. Bila ditinjau dari segi pengeluaran dan manfaat, sistem informasi manajemen akan efektif bila pertambahan hasil yang

diperoleh karena adanya informasi yang lebih besar dari pada biaya operasional sistem informasi manajemen tersebut. Dalam hal biaya, pengoperasionalan *website* sangat minim karena jenis *website* yang digunakan adalah tidak berbayar, yaitu *wordpress*.

Tantangan besar bagi pengelola mushola adalah dalam menyebarkan informasi program-program infak yang dikelola. Sementara di sisi lain, masyarakat memerlukan gambaran yang utuh berkenaan peruntukan program infak yang diikuti. Detail program menjadi daya tarik masyarakat sehingga sejauh mana informasi program bisa memberikan gambaran yang dibutuhkan, di situlah kesuksesan program diuji. Informasi tentang semua indikator agar pengelolaan keuangan mushola bisa dikatakan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) yang mana hal tersebut merupakan indikator penting di dalam pencatatan laporan keuangan mushola.

Media langsung berupa penyampaian pengumuman secara lisan pada waktu-waktu shalat lima waktu dirasa kurang memberi gambaran utuh mengenai program yang diusung karena dibatasi waktu untuk segera memulai salat (Novansyah, 2016). Perkembangan teknologi jaringan internet yang semakin maju menjadi peluang dalam mengatasi tantangan penyebaran informasi program-program mushola. Namun, sekali lagi, dibalik peluang selalu muncul hambatan, seperti terbatasnya sumber daya pengelola teknologi. Musholla Al Barokah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam desain digital, tetapi kurang mahir dalam mempromosikan (menyusun kalimat yang menarik). Karena hal ini, maka ketika mendesain pamflet misalnya, ada jeda untuk memproses informasi karena membutuhkan kolaborasi dari anggota tim yang lain.

Media sosial adalah sarana yang tepat untuk menyebarkan informasi. Media sosial ini juga telah digunakan oleh pengelola mushola. Kalimat-kalimat yang promotif dan efektif menjadi kunci sukses menarik minat orang untuk mengikuti program infak (Puspitarini, 2019). *Blog (afidburhanudin.wordpress.com)* dan media sosial *Facebook* sebagai alternatif media informasi terakhir yang digunakan untuk penyebaran program-program Musholla Al Barokah. Media ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan media perpesanan. Informasi dari

mushola bisa dijangkau oleh pembaca dari luar domisili, baik luar kota, provinsi, bahkan pulau.

B. Manajemen Pendistribusian Infak pada Mushola Al Bakorah, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Pendistribusian dana infak yang dilakukan Mushola Al Barokah diberikan secara langsung kepada yang berhak. Sasaran pendistribusian, yakni 8 *ashnaf* meliputi fakir, miskin, *amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil* yang mana sebelumnya sudah didata oleh pihak pengelola Mushola Al Barokah. Penerima manfaat program infak atau sering disebut dengan mustahik (Nuraeni, 2019) di Mushola Al Barokah berasal dari jamaah yang mengikuti kegiatan ibadah wajib maupun sunah secara rutin berjamaah di mushola tersebut.

Terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. Pertama, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial. Motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan, dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal sehingga merupakan alternatif sumber dana pembangunan (Tamin, 2011).

Dalam pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh Mushola Al Barokah ini telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan mushola dan dalam rangka memelihara mushola itu sendiri. Pendistribusian infak yang dilakukan di Mushola Al Bakorah meliputi pembagian paket sembako kepada jamaah yang kurang mampu dan pemberian hadiah atau penghargaan pada saat kegiatan perlombaan-perlombaan yang sering diadakan.

Pendistribusian infak dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam;
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa;
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin;
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Perolehan dana yang masuk ke dalam kas Mushola Al Barokah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus mushola guna untuk merawat atau membelanjakan perlengkapan kebutuhan Mushola Al Barokah itu sendiri. Contoh pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus mushola, mulai dari biaya perawatan kelistrikan, perawatan *sound system*, pemeliharaan mushola seperti pengecatan dinding mushola dan pagar maushola serta mengisi freon AC, membayar penceramah, buka bersama, serta memperbaiki peralatan mushola yang sudah tidak layak dipakai seperti, sajadah, jam dinding, dan jam digital. Ada pula pengeluaran lainnya, seperti membeli buku bacaan, Al-Qur'an, dan lain-lain. Perolehan dana yang dikeluarkan tidak lain digunakan untuk membuat kenyamanan bagi umat dan masyarakat di sekitar Mushola Al Barokah itu sendiri.

Dari semua dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengurus mushola, dana tersebut sudah menimbulkan progres yang jelas. Hasil maupun manfaat yang telah ditimbulkan, seperti halnya untuk menjaga kelestarian dan kenyamanan bagi masyarakat. Contoh kecilnya, seperti pembelian papan tulis, *LCD* proyektor untuk anak-anak belajar mengaji setiap sore dan pengajian setiap malam. Hal itu dilakukan guna untuk membuat masyarakat nyaman dengan sarana prasarana yang diberikan Mushola Al Barokah ini.

C. Manajemen Pelaporan Infak pada Mushola Al Bakorah, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Laporan kegiatan mushola bagi pihak pengurus mushola maupun bagi masyarakat umum bernilai sangat penting (Pratiwi, 2022). Contohnya, penyusunan laporan keuangan oleh pengurus mushola bertujuan agar pengelolaan keuangan mushola menjadi terstruktur. Setiap dana masuk maupun dana keluar, semuanya ditulis di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan juga sebagai bukti bagi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena memberikan informasi terkait aliran dana masuk dan keluar serta penggunaannya hingga saldo yang dimiliki untuk kas mushola. Transparansi ini perlu dilakukan oleh pengurus mushola untuk menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya, ada enam indikator transparansi, yaitu sebagai berikut (Raudhah, 2016):

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses;
- 2) Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan;
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum;
- 4) Laporan tahunan;
- 5) *Website* atau media publikasi organisasi;
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Hasil observasi peneliti bahwa pelaporan keuangan tidak disampaikan secara rinci pada papan informasi yang ada di dalam mushola maupun dalam pengumuman. Pada saat pengumuman, peneliti juga merekam sebagai bukti lapang bahwa hanya tersedia pengumuman total infak tanpa disertai perincian yang jelas seperti pada umumnya mushola. Hanya ada informasi tentang pemasukan minggu lalu dan tata tertib pada saat pelaksanaan solat lima waktu. Berdasarkan pengamatan lapangan, masyarakat yang memberikan sedekahnya secara langsung pada kontak infak maupun secara langsung kepada pengurus, maka tidak akan mendapatkan bukti rekaman dari pemberiannya tersebut. Namun, jika infak

disampaikan melalui transfer bank, maka bukti transaksi dari bank dapat menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah berinfak di Mushola Al Barokah. Hal ini berguna sebagai sistem pengawasan agar pemasukan masjid tercatat secara jelas.

Berdasarkan hasil observasi lapang, peneliti juga menemukan bukti bahwa kegiatan-kegiatan mushola yang akan dilaksanakan telah dipublikasikan sebelumnya kepada masyarakat melalui mading mushola. Namun, tidak demikian pada *website*. Informasi pada *website* tidak diperbarui sebagaimana yang dilakukan di mading. Perlu diketahui bahwa *website* atau *blog* yang digunakan untuk pengelolaan mushola saat ini bukanlah khusus untuk mushola, melainkan *blog* pribadi milik salah satu pengelola mushola.

Dari hasil pengamatan, banyak masyarakat atau jamaah yang melihat pengumuman tersebut di papan informasi setelah selesai menunaikan sholat di mushola. Apabila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan, akuntabilitas dari pengelolaannya sudah cukup baik. Pimpinan mushola juga berperan aktif dalam memotivasi pengelola mushola untuk dapat melayani jamaah secara luas dan memberikan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh jamaah. Sayangnya, pengelolaan *website* atau *blog* masih kurang maksimal karena terkendala sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus mushola untuk meningkatkan kapasitas pengelola mushola agar lebih profesional mengelola media sosial atau digital supaya lebih menarik serta lebih aktif dalam menyebarkan setiap informasi terbaru dari Mushola Al Barokah.

Selain penerimaan, pengelolaan, dan penggunaan kas, pengelola mushola perlu melakukan pencatatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan amanah kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Akan tetapi, laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus mushola masih sangat sederhana, yaitu berbentuk laporan kas dengan bentuk empat kolom, yaitu: uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Selain itu, pengawasan pengelolaan mushola juga perlu dilakukan oleh takmir dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan hal yang dibutuhkan, seperti dalam hal fasilitas mushola, yaitu peralatan yang dibutuhkan mushola secara rutin,

aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan infak sudah berjalan efektif, hal ini terlihat dari peran aktif pimpinan dalam memotivasi seluruh takmir mushola Al Barokah untuk bisa melayani jamaah lebih baik dengan memberikan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi jamaah. Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peran aktif jamaah secara langsung dalam kegiatan mushola.
2. Pendistribusian infak yang dilakukan Mushola Al Barokah memberikan manfaat seperti halnya untuk menjaga kelestarian dan kenyamanan bagi masyarakat. Pemasukan, yaitu dana atau uang yang diterima oleh pihak mushola untuk kepentingan mushola itu sendiri serta masyarakat sekitar mushola yang dijelaskan darimana saja sumbernya.
3. Pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengurus Mushola Al Barokah didalam pelaporannya menggunakan papan informasi yang terdapat di dinding mushola, dilaporkan kepada jamaah setiap seminggu sekali sehabis sholat, dan melalui *WhastsApp* setiap satu tahun sekali. Pengawasan pengelolaan mushola perlu dilakukan oleh takmir dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan hal yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas mushola, yaitu peralatan yang dibutuhkan mushola secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pengguna media digital baik itu belum digunakan secara optimal untuk pelaporan keuangan dan program karena terkendala kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

REFERENSI

Abidah, Atik. 2016. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Kodifikasia*. Volume 10 No 1: 164.

- Alam, Ahmad. 2018. "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia." *Journal Homepage*, Volume 9, Issue 2
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat: Studi kasus perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press
- Mufraini, M. Arief. 2008. "Akutansi dan Manajemen Zakat". Jakarta: Kencana
- NU Care-LAZISNU, "Meraih Keutamaan Membangun Masjid," dalam https://nucare.id/news/pahala_membangun_masjid#, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2022, jam 21.00).
- Nurdiansyah, Edwin. 2018. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat." *JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA*, Vol 3, No 2.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 2
- Ridwan, Murtadho. 2016. "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak." *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2.
- Susilawati, Nilda. 2018. "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat." *Intaj: Jurnal Fakultas dan Bisnis Islam*, Vol 4, No 1.
- Novansyah, A., Sunardi, H., dan Ramadhan, M. 2016. Sistem informasi pengolahan zakat dan infaq pada masjid agung Palembang. *Jurnal Informatika Global*, 6(2).
- Sundesyah, Tatang T. 1997. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah